

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah” Maka sudah jelas Negara Indonesia memiliki tanggungjawab konstitusional terhadap penegakan perlindungan HAM. Dalam terjadinya tindak pidana perkosaan peran korban menjadi sangat penting dan menjadi salah satu faktor utamanya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran korban tindak pidana perkosaan yang ditinjau dari perspektif viktimologi dan bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh korban untuk mendapatkan haknya sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jenis penelitian kualitatif pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan bahan hasil kepustakaan dilihat dari segi perundang-undangan dan perspektif viktimologi. Peran korban dalam perspektif viktimologi diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah korban dan solusinya, memastikan korban diperlakukan sebagai bentuk tanggungjawab negara. peraturan tersebut digubakan sebagai pedoman bagi korban mendapatkan haknya sebagai fasilitas dari negara yang sudah menjadi tanggung jawab negara, korban harus menggunakan haknya atas perlindungan hukum agar mencegahnya dari bahaya yang lain.

Kata Kunci : Perkosaan, Korban, Viktimologi



ABSTRACT

The provisions of Article 28 paragraph (4) of the 1945 Constitution which reads "The protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the State, especially the government." So it is clear that the Indonesian State has a constitutional responsibility for enforcing human rights protection. In the occurrence of a crime of rape, the role of the victim is very important and is one of the main factors. This research was conducted to find out the role of the victim of the crime of rape as viewed from a victimology perspective and how legal protection is provided by the victim to obtain their rights in accordance with Law Number 13 of 2006, Amendment to Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. This type of qualitative research, with a normative juridical approach, is an approach using literature from a legal perspective and a victimology perspective. The role of victims in a victimology perspective is implemented to resolve victims' problems and solutions, ensuring victims are treated as a form of state responsibility. This regulation is used as a guideline for victims to obtain their rights as facilities from the state which have become the state's responsibility. Victims must use their rights to legal protection to prevent them from other dangers.

Keywords: *Rape, Victims, Victimology*

